

## GERWANI IN THE COMMUNIST IDEOLOGY OF 1950-1965

### GERWANI DALAM PERGULATAN IDEOLOGI KOMUNIS 1950-1965

Rizqi Irza Affi<sup>1</sup>, Sofyan Kristianwantoni<sup>2</sup>  
 SMK Taruna Mandiri Srono  
 ibnunukman@gmail.com

(\*) Corresponding Author  
 +62 823-3119-3233

**How to Cite:** Irza, Kriswantoni (2019). Title of article. Santhet, 3(1), 10-20 doi:

Received : 28 Desember 2019  
 Revised : 6 Januari 2019  
 Accepted: 19 April 2019

**Keywords:** Gerwani;  
 Pergulatan Ideologi;

#### Abstract

The emergence of Gerwani stems from the gathering of six women's organizations in Semarang on June 4, 1950 to merge their respective organizations into one single forum, namely Gerwis. Gerwis has a strong desire for the struggle for national independence and ending various political feudalism. In writing this article using the heirloom study approach. The results show that In December 1951 the name Gerwis changed to Gerwani. In 1964, Gerwani began designing work programs to develop himself and participate in politics. The programs include: Women's Rights; Children's Rights; Democratic Rights; Full National Independence; and peace.

#### PENDAHULUAN

Dalam perjalanan gerakan wanita, Gerwani sebetulnya memiliki peran yang cukup berarti dengan mengangkat isu-isu kontroversial pada masanya itu. Seperti isu hak pilih dan isu poligami. Kekritisan para wanita terhadap ketidakadilan dan penindasan kaumnya merupakan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi gerakan wanita selanjutnya. Terdapat beberapa hal penting yang berpengaruh pada para wanita dalam organisasi Gerwani sehingga menjadi kritis dan terkesan radikal, antara lain karena adanya kawin paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, dan penghinaan-penghinaan lain yang sangat menyudutkan kaum wanita. Hal-hal itu merupakan bagian dari praktik sistem budaya warisan feodal yang masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia pada saat itu.

Gerwani memilih Semarang sebagai basis karena secara historis

merupakan "Kota Merah", kota kelahiran partai yang berideologi komunis yaitu PKI. Banyak anggota Gerwani yang juga merupakan anggota PKI karena hanya partai inilah yang dilihat bersungguh-sungguh dalam melawan penindasan terhadap rakyat. Aktivitas Gerwani di kota Semarang sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Program-Program Kerja Gerwani. Meskipun program-program kerja tersebut baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 1964, namun sebelumnya sudah diterapkan di daerah-daerah termasuk di kota Semarang.

Pertanyaan pokok dari artikel ini adalah bagaimana hubungan Gerwani dengan Partai Komunis Indonesia? Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber primer diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Arsip Daerah Jawa

Tengah, Arsip Museum Mandhala Bhakti Semarang. Ada juga beberapa harian yang terbit pada masa itu seperti *Harlan Rakjat*, *Bintang Timur*, *Sinar Harapan*, *Api Kartini*. Riset kepastakaan ini penting karena melalui penelusuran dan penelaahan kepastakaan dapat dipelajari bagaimana menggunakan kerangka teori untuk landasan pemikiran (Koenjaraningrat, 1983).

Dalam perjalanan sejarah, wanita pernah menjadi aktor yang vokal ditengah gelanggang politik dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang "baik" selama perjuangan anti kolonial. Dua peranan ini dapat berpadu dalam praktiknya, karena wanita harus memainkan peranan politik justru agar supaya menjadi ibu yang baik (dari rakyat dan bangsa Indonesia), dan istri yang baik (sebagai pembantu laki-laki dalam perjuangannya). Hubungan politik antara wanita dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar ketika Indonesia telah merdeka. Hal itu antara lain karena tidak adanya lagi musuh bersama, sehingga laki-laki cenderung mengklaim bidang politik sebagai bidang mereka sendiri, dan wanita lebih diposisikan untuk berperan di bidang sosial (Anonim, 1988).

Para tokoh Perintis gerakan wanita belum mempunyai perkumpulan atau organisasi wanita, dengan kata lain berjuang secara perorangan; tetapi dalam kenyataan bahwa mereka mengangkat senjata bahu membahu dengan kaum laki-laki melawan penjajah Belanda, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka merupakan sumber inspirasi bagi generasi wanita berikutnya untuk berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Juga para tokoh Perintis dalam masa sesudah diterapkannya Politik etis Belanda di Indonesia, memberikan teladan dan dorongan kepada kaumnya untuk meneruskan jejak langkah mereka. Mereka berjuang untuk emansipasi dan partisipasi untuk membangun kemandirian kaumnya, kemajuan bangsa dan kemerdekaan tanah airnya. Unsur lain gerakan wanita Indonesia yang sedang tumbuh ialah hasrat untuk "emansipasi nasional." Dalam pada itu pengaruh warisan cita-cita Kartini untuk emansipasi wanita berkumandang menembus batas dan

perhatian kaumnya pada periode kebangkitan dan kesadaran nasional ini mulai juga untuk meningkatkan perjuangan wanita.

## METODE PENELITIAN

Daerah penelitian adalah suatu lokasi atau tempat yang digunakan seorang peneliti untuk mengadakan penelitian. Sutrisno Hadi mengatakan, "Tidak ada ketentuan berapa luas penelitian untuk penelitian dalam salah satu atau banyak bidang (2003:88)".

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa di dalam menentukan daerah penelitian tidak ada ketentuan berapa luas daerah atau lokasi penelitian. Dalam artikel ini untuk menentukan hasil penelitian yang akurat menggunakan studi pustaka yang didalamnya menggunakan pendekatan penelitian sejarah mulai dari kritik sumber, analisis sumber dan validasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesudah tahun 1950 persatuan gerakan wanita Indonesia, yang telah dibangun pada masa perjuangan nasional sebelumnya, berangsur-angsur hancur. Dalam menghadapi pemilihan umum 1955 berbagai partai politik membentuk bagian wanita masing-masing. Ketegangan antara golongan wanita Islam dan nasionalis pun timbul. Berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai wanita, bank-bank wanita, bahkan surau wanita didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah wanita, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada partai politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki. Pada sebagian besar organisasi ini pandangan elitis tetap bertahan, walaupun pendudukan Jepang dan perjuangan pembebasan nasional telah mengaburkan tajamnya garis pemisah antara golongan

kaya dan miskin dalam masyarakat Indonesia.

### Berdirinya Gerwis

Para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang pada 4 Juni 1950 untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal, yaitu Gerwis. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.

Tokoh-tokoh wanita tersebut memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda, tapi semuanya bersama-sama terjun ditengah pergerakan nasional. Diantaranya S.K. Trimurti. Beliau anggota Partindo, giat dalam Wanita Partindo, dan juga anggota Gerindo. Kemudian Salawati Daud, Walikota Makasar. Diantara mereka banyak wanita muda, seperti Sudjinah dan Sulami, sebelumnya sudah giat di dalam PPI (Pemuda Putri Indonesia), organisasi pemudi semasa perjuangan kemerdekaan yang berjiwa sosialis. Para anggota pendiri lainnya termasuk Tris Metty, Sri Panggihan (anggota PKI terkemuka dari Madiun), Sri Kusnapsiyah, Umi Sarjono (pendiri Gerwindo), dan Suharti (ketua departemen wanita CC PKI, ketua cabang Yogya) (*Antara*, Dinas Dalam Negeri. No. 160/A. 9 Juni 1950).

Ketua Gerwis yang pertama adalah Tris Metty. Sebelumnya beliau adalah Ketua Rukun Putri Indonesia yang berpolitik mandiri, dan juga anggota Laskar Wanita Jawa Tengah. S.K. Trimurti dari Jogjakarta sebagai wakil ketua dan Srie Kustijah dari Semarang sebagai penulis. Dalam rapatnya yang pertama, Gerwis telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah, antara lain minta supaya "fonds" pembangunan negara ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan menghendaki negara kesatuan yang 100 persen lepas dari "isme" penjajahan. Kedudukan Tris Metty tersisihkan dalam konferensi di Yogya, untuk mempersiapkan kongres I Gerwis, dan digantikan oleh S.K.

Trimurti. Dalam periode ini Umi Sarjono, Suharti, dan Mudigdio, sudah menjadi anggota atau mempunyai ikatan erat dengan PKI. Hal ini merupakan petunjuk jelas, bahwa kaum Komunis mempunyai suara penting dalam pendirian Gerwis. Meskipun Gerwis selalu menegaskan sebagai non-politik dan tidak mempunyai kaitan dengan parpol manapun, seperti dinyatakan dalam anggaran dasarnya, namun pengaruh PKI tampak tertanam sangat mendalam pada organisasi tersebut. Keinginan Komunis untuk membangun organisasi wanita yang bisa dipimpinya, tentu saja bukan merupakan satu-satunya faktor bagi berdirinya Gerwis. Para pendiri Gerwis itu sendiri mempunyai hasrat bersama yang sungguh-sungguh, baik demi perjuangan kemerdekaan nasional maupun mengakhiri berbagai politik feodalisme.

Hampir semua sejarah hidup para tokoh dan anggota Gerwani bercerita tentang kawin paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, atau penghinaan-penghinaan lain yang terasa sangat menusuk hati mereka, maka mungkin sekali hal-hal tersebut itulah yang berperanan sangat besar dalam meradikalkan para wanita tersebut. Beberapa dari mereka tertarik kepada PKI, karena hanya partai inilah yang dilihat bersungguh-sungguh melawan berbagai praktik demikian.

Pemimpin Gerwis yang sangat terkemuka, Ibu Munasiah, yang berbicara dengan garangnya dalam Kongres PKI 1924 dan dibuang ke Digul, berasal dari Semarang. Dialah yang mengorganisasi "Aksi Caping Keropak", yang terkenal semasa perjuangan kemerdekaan itu. Ketika organisasi yang masih muda ini sedang sibuk membenahi dirinya, dan membangun cabang-cabangnya di seluruh Jawa dan di luar Jawa, memperketat pengawasannya terhadap "keresahan sosial", pada Agustus 1951 terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Gerwis, termasuk ibu Mudigdio dan Ibu Trimurti. Keduanya diperiksa selama satu minggu dan oleh karena itu para anggota Gerwis giat dalam panitia "Pembelaan Korban Razzia Agustus".

## Metamorfosa Gerwis menjadi Gerwani: Kongres-kongres Gerwani

### a. Kongres pertama tahun 1951

Kongres Gerwis pertama kali diselenggarakan pada 17-22 Desember 1951 di Surabaya. Pada waktu itu keadaan sangat sulit, banyak utusan yang harus menghadiri kongres masih ada di penjara. Jika dilihat dari nama Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar berarti bahwa anggota organisasi ini bersifat terbatas. Hanya kaum wanita yang telah sadar yang akan diterima sebagai anggota, sedangkan jutaan massa wanita masih belum sadar akan arti politik. Mereka seharusnya ditarik untuk masuk ke dalam organisasi ini agar bisa terlibat dalam perjuangan. Oleh karena itu, Gerwis dikecam oleh anggota PKI. Sejalan dengan sejumlah perubahan yang terjadi pada PKI, dengan terpilihnya D.N. Aidit sebagai pimpinan baru (Januari 1951), terjadi tekanan di dalam Gerwis agar menghentikan agitasi perlawanannya terhadap pemerintah dan sebaliknya agar membangun "front dari bawah" (Hikmah Diniah, 2007).

Tindakan penting yang diambil pada Kongres I ialah mengecilkan sayap feminis di dalam organisasi dan berusaha mengkonsolidasi pengaruh PKI terhadap pimpinan organisasi. Akan tetapi Suharti, salah satu calon dari PKI, dipandang terlalu "komunis" oleh mayoritas kongres, hingga PKI di satu pihak terpaksa harus menarik pencalonannya, di lain pihak menghalangi kepemimpinan S.K. Trimurti. Semasa perjuangan kemerdekaan S.K. Trimurti telah melatih banyak tokoh Gerwis, melalui berbagai kursus kader yang diselenggarakannya selaku Ketua Barisan Buruh Wanita. Umi Sarjono menang dalam pemilihan untuk kedudukan pertama, Trimurti di tempat ke dua, dan Suwarti tempat ke tiga. Karena Trimurti tidak bisa diterima PKI, Umi Sarjono mengundurkan diri, dan memberikan kursinya kepada Suwarti. Mereka berdua, Trimurti dan Umi Sarjono, lalu menjadi wakil-wakil ketua. Pada tahun 1957 Trimurti mengundurkan diri dari kepemimpinan, dan pada tahun 1965 dari keanggotaan.

Mencermati sejarah Gerwis dapat diketahui, bahwa pada tahun 1952 pernah bergabung Isteri Buruh Kereta Api, berikut dengan 10 cabang-cabang serta 4000 anggotanya. Kemudian pada tahun 1953 masuk pula yang terakhir organisasi Perwin, persatuan Wanita Indonesia dari Manado. Organisasi ini sudah tampil didepan dalam perang kemerdekaan. Mereka aktif melawan upaya Belanda untuk kembali menguasai bagian mana pun dari Indonesia, dan menentang KMB yang dalam pandangan mereka akan mendorong kembalinya modal asing ke Indonesia. Antara Kongres I dan Kongres II, Gerwis aktif dalam tiga front, yaitu politik, feminisme, dan sosial ekonomi. Pada front politik, melawan "unsur-unsur reaksioner", terhadap gerakan untuk kemajuan wanita. Pada front feminisme, melawan PP 19 (mengenai pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil) dan menyokong perjuangan umum untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, dengan sependai mungkin menghindari konfrontasi dengan Sukarno. Front sosial ekonomi lebih ditekankan pada level *grassroot* dimana anggota Gerwis aktif dalam gerakan tani melawan usaha pemerintah mengusir mereka dari bekas tanah perkebunan yang telah mereka garap.

Gerwis aktif menempuh politik anti imperialisme sejak awal sejarahnya. Menurut Gerwis, pemerintah yang dikangkangi PNI, Masyumi, dan PSI, dengan membiarkan kembalinya para pemilik perkebunan asing, menjadi terlalu bersikap lunak terhadap modal asing dan imperialisme. Oleh karena itu, kaum wanita sebagai ibu rumah tangga menjadi sangat menderita. Sejak awal mula Gerwis merupakan organisasi wanita yang paling aktif di bidang politik nasional (Wierenga, 1999).

Gerwis mengeluarkan pernyataan menentang "unsur-unsur reaksioner" yang telah mengorganisasi "Peristiwa 17 Oktober" 1952 (*Harian Rakjat*, 7 November 1952) dan masuk dalam Front Nasional yang dibentuk dalam rangka perkembangan tersebut (*Harian Rakjat*, 20 November 1952). Gerwis juga ikut memprotes PP 19, dan mendukung tuntutan *reform* perkawinan yang diajukan

Kongres II Kongres Wanita Indonesia tahun 1952 (*Harian Rakjat*, 25 November 1952).

Konferensi kerja Gerwis tahun 1952 di Semarang membahas sekitar permasalahan perdamaian, hak-hak anak dan wanita (*Harian Rakjat*, 1 Desember 1952) Gerwis juga banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah pendidikan melek huruf, pembukaan sekolah, dan kursus-kursus PBH (seperti juga organisasi-organisasi wanita lainnya), sampai 1965. Pada awal 1952 Gerwani mengajak organisasi wanita Indonesia lainnya untuk ikut merayakan tanggal 8 Maret sebagai hari Solidaritas Perempuan Internasional (Wierenga, 1999).

#### **b. Kongres kedua tahun 1954**

Dalam usahanya untuk menjadi organisasi massa wanita, Gerwis memberi perhatian juga pada sejumlah masalah yang sangat dirasakan kaum wanita, yaitu soal penurunan harga bahan kebutuhan pokok. Ini menyebabkan Gerwis menjadi berbeda dari berbagai organisasi wanita lain saat itu pada umumnya. Pada Kongres II bulan Maret 1954 di Jakarta bertema hak-hak wanita dan anak-anak, kemerdekaan dan perdamaian. Tuntutan tentang perdamaian mencakup baik pendirian anti-imperialisme pada umumnya, dengan mengutuk keras percobaannuklir, maupun tuntutannya menumpas gerakan Darul Islam, yang sangat anti komunis dan melakukan teror di desa-desa, khususnya di Jawa Barat (*Harian Rakjat*, 27 Maret 1954).

Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Kongres I, Gerwis diubah menjadi Gerwani. Dengan terpilihnya Umi Sarjono sebagai ketua, berarti sayap feminis berhasil menahan PKI. Dewan pimpinan pusat yang baru juga mendudukkan Suharti sebagai wakil ketua pertama, Ny. Mudigdiyo sebagai wakil ketua kedua; Asiyah dan Darmini sebagai sekretaris; Kartinah, Mawarni, Paryani, dan Suwarti sebagai anggota. Trimurti sudah tidak lagi menjadi anggota dewan ini, melainkan tinggal sebagai anggota pleno yang terdiri dari 35 anggota (*Harian Rakjat*, 2 April 1954).

Organisasi ini telah mengalami perkembangan luar biasa selama tahun-tahun antara Kongres I dan Kongres II. Di

surabaya Gerwis mempunyai 40 cabang dengan 6000 anggota. Pada tahun 1954 jumlah anggota telah naik menjadi sekitar 80.000. Pimpinan Gerwis menekankan arti penting kerja sama dengan berbagai organisasi wanita lain atas dasar menghormati perbedaan yang ada. Organisasi ini menyelenggarakan kursus PBH dan membuka sejumlah tempat penitipan anak. Selain itu juga berusaha mengadakan berbagai kursus kader, tapi rencana ini tertunda karena alasan keuangan, hingga cabang-cabang dibiarkan menatar para kader mereka tanpa menunggu pedoman dari pusat. Kesulitan keuangan juga mengharuskan organisasi menghentikan penerbitan buletin internya. Buletin ini semula bernama Wanita Sedar, tetapi belakangan diganti Berita Gerwani. Buletin lainnya, Berita Berkala, juga terbit dalam waktu pendek saja.

Dari berbagai laporan dalam periode Kongres II maka dapat disimpulkan posisi ideologi Gerwani pada 1954. Dalam hal ini keputusannya untuk menjadi organisasi massa jelas terbaca dalam anggaran dasarnya yang baru, yang menyatakan bahwa: (a) Gerwani adalah organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, yang tidak menjadi bagian dari partai politik apapun; (b) keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua wanita Indonesia umur 16 tahun atau lebih (atau kurang jika sudah bersuami), dan mengingat sangat banyaknya wanita yang buta huruf, maka untuk menjadi anggota tidak diperlukan tanda tangan atau mengisi formulir; dan (c) keanggotaan rangkap diperbolehkan, misalnya dengan SOBSI atau organisasi wanita lain apa saja.

Resolusi paling penting yang diterima Kongres II ialah tuntutan akan undang-undang perkawinan yang demokratis. Sejumlah resolusi lain berkenaan dengan pemilihan umum yang akan datang, keamanan nasional, dan protes terhadap percobaan nuklir. Dengan demikian Gerwani menggabungkan antara alasan-alasan esensialisme (sebagai ibu) dan konstruktivisme (sebagai buruh dan warga negara), dengan memberi tekanan pada persaudaraan kaum wanita. Tetapi sekalipun Gerwani mengaku menghormati adanya

perbedaan di kalangan kaum wanita, namun hasrat hegemoninya yang berhaluan Komunis terhadap organisasi wanita lainnya, menyebabkannya menghubungkan antara "ibu" dengan "buruh", suatu kombinasi yang tidak begitu langsung dan jelas bagus.

### c. Menuju Kongres Konsolidasi tahun 1954-1957

Hasil Kongres II disebarluaskan para aktivis Gerwani kepada semua anggota organisasi mereka dan juga pada semua wanita Indonesia pada umumnya (*Harian Rakjat*, 9 Juni 1954). Salah satu tujuan utamanya ialah untuk menjadi suatu gerakan massa yang sebenar-benarnya dengan jumlah anggota yang signifikan. Untuk mewujudkan hal itu, sosialisasi ide dan program kerja dilakukan secara intensif oleh para kader, sehingga dalam waktu relatif singkat keanggotaan mencapai satu juta pada akhir 1955 (*Harian Rakjat*, 22 Juni 1956).

Sebagaimana tampak pada April 1955, keanggotaan baru tercatat sebanyak 400.000 orang, ketika berlangsung Kongres III pada bulan Desember, anggota Gerwani mencapai 663.740 orang (1 *Harian Rakjat*, 18 Desember 1957). Angka-angka tersebut mencerminkan keberhasilan strategi Gerwani. Dalam hal ini para kader diwajibkan untuk mempelajari kondisi daerah dan kebudayaan penduduk di wilayah masing-masing. Jika simpati dari para calon anggota sudah didapat, harus dibentuk kelompok-kelompok kecil, dan dari sinilah kaum wanita didorong agar menjadi lebih aktif dan disadarkan tentang hak-hak mereka. Soal perkawinan harus mendapat perhatian utama dari para kader, karena soal ini selalu menarik perhatian wanita.

Memperhatikan benar pekerjaan membangun kepercayaan di kalangan wanita, karena jika tidak umumnya mereka mempunyai perasaan rendah diri. Selanjutnya organisasi harus dikonsolidasi, dan dicari jalan bekerjasama dengan laki-laki (walau mungkin mereka berpendirian feodal). Jika ada kemungkinan bekerja di kalangan buruh wanita, pekerjaan ini harus dimulai, dan kaum wanita didorong agar giat dalam organisasi serikat buruh.

Sesudah kampanye pemilihan umum, pimpinan pusat dapat mencurahkan tenaganya lebih besar pada masalah pendidikan aktivis organisasi. Bagi kader yang bekerja di tengah masyarakat, yang tidak senang terhadap wanita yang melepaskan diri dari apa yang mereka anggap sebagai kodrat, atau "sifat kewanitaan", maka kewajiban rumah tangga mereka tidak boleh dikalahkan oleh pekerjaan di dalam organisasi. Wanita Gerwani menghadapi baik kendala ideologis (agama, kebudayaan, sikap "feodal" pada umumnya dan ketidakpercayaan karena hubungan mereka dengan politik "komunis"), maupun sejumlah hambatan praktis (bagaimana membagi waktu) (Wierenga, 1999).

Pada pertengahan 1950-an Gerwani menitik beratkan perhatiannya pada dua masalah: Pemilihan Umum tahun 1955, dan kepentingan "feminis" seperti perkosaan dan *reform* perkawinan. Ketika kampanye pemilu dimulai, Gerwani memutuskan mendukung kampanye untuk para calon dari PKI dan tidak mengajukan daftar calon-calonnya sendiri. Tetapi Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu, yaitu bahwa anggota Gerwani yang terpilih hendaknya tidak dengan sendirinya harus masuk fraksi PKI. Oleh karena wanita Indonesia sebelumnya belum pernah mendapat hak suara, maka para aktivis Gerwani giat memberikan penerangan tentang hak-hak politik dan jalannya Pemilu. Sekitar 23.480 anggota Gerwani ikut dalam kegiatan kampanye. Kampanye lainnya yang dilakukan Gerwani ialah menuntut pencabutan Undang-Undang IGO/B, yaitu Undang-Undang pemerintah kolonial tentang pemerintahan desa.

Disadari oleh pimpinan Gerwani bahwa mengurus masalah feminis, seperti perkosaan dan *reform* perkawinan, justru merupakan perjuangan yang lebih berat dibanding dengan perjuangan untuk kemerdekaan nasional. Para aktivis Gerwani di tingkat daerah benar-benar prihatin mengenai banyaknya masalah perkawinan yang harus mereka hadapi. Umi Sarjono melaporkan, pada 1956, bahwa di Jawa dan Jakarta saja para kader Gerwani

menghadapi beratus-ratus kasus tentang diabaikannya hak-hak wanita dalam perkawinan, seperti misalnya meninggalkan keluarga tanpa alasan, pergundikan, dan perselisihan harta waris. Suami meninggalkan istri dan anak-anak tanpa memberi makan atau syarat hidup apapun lainnya, dan pergi mencari wanita lain.

Para anggota Gerwani berusaha turun tangan pada permasalahan seperti ini, pertama-tama dengan mengajak sejumlah pihak yang terkait untuk berunding. Jika cara ini ternyata gagal, mereka mencari bantuan pejabat agama dalam usaha mendapat jaminan jika terjadi perceraian bagi istri dan anak-anak mereka. Dalam hal ini tidak semua perkara berhasil diselesaikan dengan kepuasan di pihak wanita, baik karena miskinnya pengetahuan hukum di kalangan wanita, maupun karena "keras kepalanya si laki-laki".

Walau periode antara Kongres II dan III merupakan periode Gerwani yang paling feminis, dengan kemungkinan pengecualian tahun pertamanya, namun tidak berarti bahwa perhatiannya terhadap masalah politik umum diabaikan. Perayaan Hari Wanita Internasional pada 1955 diwarnai sejumlah aksi perdamaian, antara lain protes menentang percobaan nuklir, serta "pembebasan" Irian Barat dari Belanda. Pada awal Januari 1957 pimpinan pusat Gerwani menyelenggarakan konferensi kerja, yang menghasilkan berbagai tuntutan sosial-ekonomi kepada pemerintah, termasuk penurunan harga bahan pokok. Pada Maret 1957 Gerwani melancarkan kampanye besar-besaran, menyokong pidato "Konsepsi Presiden", yang di dalamnya pertama-tama Sukarno menguraikan pokok-pokok perubahan undang-undang dasar, yang selanjutnya akan melahirkan Demokrasi Terpimpin. Selama periode ini Gerwani tetap berusaha menjadi juru bicara petani miskin. Beberapa bulan terakhir 1957 dilakukan kegiatan besar-besaran mempersiapkan kongres III, termasuk aksi bersama mengumpulkan dana kongres.

#### **d. Kongres ketiga tahun 1957**

Kongres III Gerwani dinamakan oleh Umi Sarjono dalam pidato pembukaannya

sebagai "Kongres Konsolidasi". Dua puluh tujuh butir program perjuangannya yang baru, dimulai dengan sembilan butir tentang hak-hak sama bagi wanita dalam perkawinan, hukum adat dan perburuhan. Beberapa butir berikutnya mengenai pelayanan sosial, seperti sekolah, penitipan anak, dan layanan kesehatan. Butir-butir lainnya lebih beragam antara lain; larangan film porno, pencabutan IGO/B, masalah pedesaan yang menyangkut bagi hasil dan riba, pajak tinggi, dan kenaikan harga bahan pokok, pembasmian gerombolan-gerombolan subversif seperti gerakan Darul Islam, dan menuntut agar percobaan nuklir semata-mata demi tujuan-tujuan perdamaian. Selain itu kongres menetapkan resolusi-resolusi seperti: "pembebasan" Irian Barat, dan tuntutan untuk undang-undang perkawinan yang demokratis, buku-buku sekolah dengan harga murah, kesetiaan pada Pancasila, hukuman berat untuk pemerkosa, usaha mengatasi kenakalan anak-anak (misalnya dengan menyediakan fasilitas rekreasi dan pelarangan film porno), dan mengubah berbagai peraturan yang diskriminatif dalam IGO/B, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar (*Harian Rakjat*, 8 Januari 1958).

#### **e. Kongres keempat tahun 1961**

Resolusi Kongres III menunjukkan bahwa Gerwani semakin tenggelam ke dalam persoalan politik nasional terkait dengan praktik Demokrasi Terpimpin. Keadaan seperti ini terus berjalan sampai pada Kongres IV dan terakhir. Pendirian Gerwani tentang politik nasional semakin sesuai dengan retorika populis Sukarno. Walau pada Oktober 1958 konferensi kerja Gerwani menyatakan keprihatinannya

terhadap penundaan Pemilihan Umum 1959 (*Harian Rakjat*, 1 Oktober 1958), namun hanya sebulan berikutnya pimpinan menyatakan bahwa Gerwani menyokong Demokrasi Terpimpin dan menentang "persaingan bebas liberalisme". Akhir tahun 1959 Gerwani menyatakan dukungan kepada Manipol, dan tuntutan untuk pemilihan umum tidak lagi terdengar. Sejak itu Gerwani mulai mengutip kata-kata

presiden untuk merumuskan setiap tuntutan. Misalnya, tuntutan untuk kesekian kali tentang undang-undang perkawinan yang demokratis, sekarang diawali dengan menyebut Presiden Sukarno yang "menegaskan bahwa revolusi belum selesai" (*Harian Rakjat*, 14 November 1958).

Sehubungan dengan situasi politik nasional, sikap Gerwani secara garis besar diuraikan dalam suatu pidato bulan Mei 1961, yang melaporkan tentang diskusi Pleno Gerwani mengenai rencana 8 tahun yang baru ditetapkan pemerintah. Gerwani menyatakan partisipasinya dalam usaha meningkatkan produksi pangan dan sandang, serta pembentukan koperasi. Tapi Gerwani menegaskan, bahwa rencana itu hanya akan terwujud jika pemerintah "diritul", seperti telah ditetapkan Manipol, dan jika rakyat diberi pengertian, harga distabilkan, dan korupsi diberantas.

Pada tahun 1961 Pernyataan Tahun Baru Gerwani dititikberatkan pada masalah harga dan perdamaian, dan tidak bicara tentang masalah perkawinan. Gerwani sebagai organisasi sosial politik wanita dalam keluarga kiri dipandang bertanggungjawab dalam mengorganisasi menentang kenaikan harga. Wanita dianggap sebagai ahli, yang bagaimana pun pandai menutupi kekurangan. Dianggap lazim bahwa laki-laki tidak mampu dan bodoh tentang ekonomi rumah tangga. PKI hampir tidak menaruh perhatian pada persoalan harga, sedangkan Gerwani terus menerus menuntut diakhirinya kenaikan harga pangan dan sandang yang cepat. Dalam hal ini presiden ikut memberi perhatian. Ketika demonstrasi mencapai puncaknya (Januari 1960), ia menjanjikan penurunan harga-harga

sampai tingkat yang layak dalam dua atau tiga tahun Gerwani tidak berhasil membuat presiden memenuhi janji itu, walau sepanjang tahun 1961 terus menerus

dilancarkan berbagai demonstrasi dan rapat umum melawan kenaikan harga (Wierenga, 1999).

Usaha Gerwani untuk mempengaruhi gerakan wanita dilandasi tiga tujuan yang saling terkait. Pertama, Gerwani ingin memimpin gerakan yang lebih luas. Mereka

yakin, bahwa sikap pengutamaannya pada kepentingan wanita Indonesia merupakan pendirian yang "benar", dan karenanya Gerwani harus mengawasi persatuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Kedua, Gerwani ingin menjadi gerakan massa. Mereka mengikuti haluan PKI tentang emansipasi wanita, yang menggariskan bahwa pertama-tama sosialisme harus dicapai lebih dahulu, dan bahwa strategi terbaik untuk itu ialah dengan penggalangan front dari bawah, untuk menekan pemerintah agar berjalan ke arah yang diinginkan. Ketiga, Gerwani menghendaki agar gerakan wanita memainkan peranannya di dalam politik nasional. Mereka dipengaruhi sejumlah ide Sukarno tentang gerakan wanita pada umumnya, dan gerakan wanita Indonesia pada khususnya (Wierenga, 1999).

Sidang Pleno DPP Gerwani pada April 1961 mencatat sejumlah sukses: (a) terselenggaranya Seminar Nasional Wanita Tani di Jakarta pada tanggal 17-20 Januari 1961 dan intensifikasi pekerjaan dikalangan wanita tani pada umumnya; (b) Gerwani telah berusaha keras menunaikan tugas nasionalnya dalam perjuangan untuk Irian Barat, dan membentuk Front Persatuan Perempuan; (c) dengan diterimanya manipol oleh MPRS sebagai garis haluan Negara, Gerwani telah bekerja keras "untuk tidak ketinggalan dalam usaha ini", dan telah meningkatkan usahanya untuk menaikkan produksi dan pembentukan koperasi-koperasi; dan (d) telah mengadakan berbagai tempat penitipan anak, karena tanpa ini wanita tidak mungkin ikut serta dalam semua tugas nasional itu.

Sidang Pleno mengemukakan dua kegiatan mendesak: (a) menyelenggarakan pendidikan lebih lanjut, dan (b) biro konsultasi nasional untuk membantu para kader di luar Jawa, juga kader-kader yang giat dalam masalah perkawinan dan perceraian; serta (c) menarik lebih banyak lagi kaum ibu rumahtangga. Dikemukakan dalam program Gerwani yang diputuskan dalam Kongres IV pada Desember 1961, bahwa program kerja yang baru memerlukan sedikit perubahan saja; karena masyarakat masih tetap setengah feodal, peraturan



IGO/B masih belum dicabut, dan Parlemen masih belum memutuskan undang-undang perkawinan. Satu-satunya pasal dari program kerja 1957 yang dapat dicoret hanyalah tentang bagi hasil, karena sudah berlebihan dengan adanya undang-undang baru. Gerwani merasa bahwa dukungan dari Presiden Sukarno sangat penting artinya untuk keluarga PKI, yang di dalamnya termasuk Gerwani. Karena itu pimpinan Gerwani berusaha mengundang Presiden agar bersedia memberikan amanatnya pada pembukaan Kongres IV (Wierenga, 1999).

Pidato pembukaan Presiden Sukarno di depan Kongres IV tahun 1964 di Jakarta mengulangi masalah tentang peranan Gerwani dalam melaksanakan persatuan mutlak seluruh bangsa berdasarkan Nasakom, dan tentang ketidaksukaannya pada "*ladies movement*". Sukarno, yang dalam bukunya Sarinah begitu fasih membela emansipasi wanita dan perlunya reform perkawinan, sekarang hampir tidak berbicara tentang kepentingan gender yang diperjuangkan Gerwani. Resolusi yang ditetapkan Kongres IV diurutkan sebagai berikut: Irian Barat, membantu pelaksanaan *land reform*, undang-undang perkawinan yang demokratis, keamanan nasional, penurunan harga, dan perdamaian. Tidak terjadi perubahan penting dalam pimpinan, walau terjadi amandemen peraturan dasar. Perubahan penting di sini menambah dengan pernyataan kesetiaan pada manipol di dalam mukadimah.

Program perjuangan meliputi masalah hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, demokrasi dan keamanan, kemerdekaan penuh dan perdamaian, dengan yang tersebut pertama paling dirinci. "Hak-hak wanita" dalam program perjuangan, yang pertamanya ialah kesamaan hak dalam perkawinan dan pekerjaan, hak mengabdikan untuk jabatan terpilih dan dalam lembaga politik, dan kesamaan hak atas tanah. Ke dua, Gerwani ikut bersama wanita tani mengatasi masalah-masalah mereka. Terakhir, mencantumkan perjuangan untuk penurunan harga-harga dan diperbanyaknya balai kesehatan. Dengan demikian, walau ada garis kesetiaan pada tujuan, seperti yang dirumuskan Sukarno dan Aidit, namun

Gerwani masih memberikan prioritas perjuangannya pada hak-hak wanita di dalam kegiatan praktis, seperti yang telah ditetapkan dalam program perjuangannya itu.

### Afiliasi Gerwani dengan PKI

Salah satu di antara masalah-masalah paling mendesak yang dihadapi Gerwani dan yang juga menimbulkan diskusi-diskusi hangat terutama di kalangan pimpinan pusatnya adalah persoalan "otonomi" organisasi dalam hubungannya dengan pimpinan PKI. Khususnya karena kejadian-kejadian dramatis sesudah Oktober 1965, masalah ini perlu dianalisis dengan lebih cermat.

Pada awal dasawarsa 1950-an terjadi perdebatan sengit antara anggota-anggota organisasi (ketika itu masih Gerwis) yang menginginkan organisasinya menjadi organisasi dari orang-orang yang berkesadaran sangat tinggi mengenai soal-soal organisasi, khususnya soal-soal yang lebih "feminis" seperti poligami, dengan di lain pihak anggota-anggota yang menginginkan masuknya juga orang-orang yang tidak begitu sadar tentang soal-soal feminis, dan tidak begitu tertarik pada debat-debat berat dan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Golongan kedua ini berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif jika memperluas keanggotaannya di kalangan massa, yang berangsur-angsur dan dengan kerja keras akan ditingkatkan kesadarannya. Dalam jangka panjang khalayak yang lebih besar akan dijangkau, meskipun soal-soal yang diangkat tidak seluruhnya dibahas secara ideologis (baik dari sudut feminis maupun kiri) secara murni seperti yang diinginkan. Golongan "murni" kalah dalam pertarungan ini, dan golongan yang menghendaki Gerwis/Gerwani lebih mendekat ke PKI dengan pendekatan garis massanya mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian secara resmi Gerwani tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Pada bulan Desember 1965 rencananya akan diselenggarakan kongres yang akan membahas masalah afiliasi ini. Mungkin sekali gagasan afiliasi dengan PKI akan

diterima kongres, tetapi peristiwa bulan Oktober 1965 menggagalkannya.

Implikasi lain ialah bahwa organisasi sebenarnya belum pernah membahas secara terbuka masalah-masalah seperti pembagian kerja seksual tradisional, walaupun sejumlah kader telah berjuang menentang ketidakadilan yang cukup nyata pada tingkat perorangan. Beberapa kader dengan tegas menyebutkan usaha mereka untuk mendidik anak-anak laki-laki agar mau mengerjakan tugas-tugas rumah-tangga bersama-sama, dan suami juga diharapkan mengerjakan pekerjaan rumah-tangga yang umumnya dipandang nyaris sebagai tugas wanita saja. Pada tahun 1964 pemerintah menginstruksikan semua ormas agar mencari gandulan masing-masing pada suatu parpol.

Kemerosotan ekonomi, kampanye anti-Malaysia, dan polarisasi yang semakin runcing antara PKI dan kekuatan kanan sepanjang tahun 1962 sampai 1 Oktober 1965 mengakibatkan Gerwani (yang menempatkan diri di tengah keluarga PKI dan sisi Soekarno) menjadi terseret di dalamnya. Dalam konfigurasi yang kompleks ini pimpinan Gerwani berusaha mempertahankan identitasnya sendiri. Gerwani tidak pernah menukar perjuangannya untuk hak-hak wanita dengan partisipasi politik sepenuhnya di dalam poros Soekarno-PKI. Ideologi resmi Gerwani selama periode ini ialah: perjuangan demi hak-hak wanita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demi masyarakat sosialis, atau perjuangan melawan imperialisme, maka dari itu Gerwani harus ambil bagian dalam perjuangan untuk *land reform* dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan beberapa alasan utama terciptanya stigma Gerwani sama dengan PKI.

Jadi ringkasnya hubungan Gerwani dengan PKI adalah hubungan yang mendua dan rumit. Pada umumnya Gerwani menyokong kampanye-kampanye politik terpenting yang dilancarkan PKI, tetapi juga ada beberapa titik perselisihan di antara keduanya. Pada awal dasa-warsa 1950-an, ketika ketegangan politik meningkat dan masyarakat Indonesia semakin mengalami

politisasi dan polarisasi, Gerwani bergeser semakin dekat dengan PKI. Perkembangan ini terbawa oleh mereka yang mempunyai keanggotaan rangkap, PKI dan Gerwani sekaligus. Tetapi sampai saat terakhir Gerwani tidak pernah secara resmi menjadi bagian wanita PKI.

Pada tahun 1964, Gerwani mulai merancang program-program kerja guna mengembangkan dirinya dalam suasana politik yang semakin memanas. Program-program itu meliputi: Hak-hak Wanita; Hak-hak Anak; Hak-hak Demokrasi; Kemerdekaan Nasional yang Penuh; dan Perdamaian.

#### a. Hak-hak Wanita

Program kerja pertama dan utama dalam Gerwani adalah mengenai masalah hak-hak wanita. Hak-hak wanita yang menjadi program kerja Gerwani meliputi persamaan hak dengan laki-laki dalam politik, hak perlindungan perkawinan, hak memilih kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hak wanita jika menjadi janda, hak wanita kaum buruh, hak wanita dalam tata pemerintahan, hak kesehatan, hak untuk turut melaksanakan *land reform*. Paling tidak terdapat 22 program Gerwani yang memperhatikan masalah hak-hak wanita.

#### b. Hak-hak Anak

Titik perhatian kedua dalam program kerja Gerwani adalah mengenai hak-hak anak. Kehidupan anak sangat erat dalam rangkaian peran wanita dan dalam hal ini adalah ibu. Gerwani memandang hak-hak anak tidak dapat dilepaskan dari hak-hak wanita. Hak-hak anak dalam program Gerwani misalnya hak anak untuk bebas dari buta huruf, hak anak untuk mendapat pendidikan, hak anak untuk mendapatkan hiburan yang tidak bersifat cabul dan propaganda perang.

c. Hak Demokrasi; Kemerdekaan Nasional yang Penuh; dan Perdamaian. Gerwani memperhatikan hak-hak wanita dalam demokrasi, perdamaian, dan kemerdekaan. Misalnya hak untuk turut serta dalam usaha pembebasan Irian Barat.

## KESIMPULAN

sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Program-Program Kerja Gerwani. Meskipun program-program kerja tersebut baru dibuat dan dikeluarkan pada tahun 1964, namun sebelumnya sudah diterapkan di daerah-daerah termasuk di kota Semarang. Program kerja Gerwani di kota Semarang antara lain membentuk koperasi-koperasi sampai ke tingkat desa dan membantu usaha-usaha rumah tangga (misalnya menjahit, memasak, kerajinan tangan, dan industri-industri kecil lainnya). Kemudian Gerwani kota Semarang sering melakukan demonstrasi menuntut penurunan harga barang-barang pokok. Selain itu Gerwani kota Semarang juga membentuk beberapa Sekolah Rakyat (sekarang SD) untuk membantu program pemerintah mengenai pemberantasan buta huruf.

Setelah peristiwa G30S berlangsung, maka terjadi penumpasan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Penumpasan tersebut berupa tindakan represi bahkan pembunuhan terhadap anggota PKI dan ormas-ormasnya, termasuk Gerwani. Kaum wanita yang merupakan anggota Gerwani dan yang dituduh sebagai anggotanya, mengalami penderitaan karena ditangkap, ditahan, disiksa, dipenjarakan, dibuang, juga diperkosa bergiliran dan dilecehkan martabat kemanusiaannya, dihancurkan rumahtangganya, serta difitnah habis-habisan. Aksi pelecehan seksual dan perkosaan terhadap tapol wanita dalam tahanan seringkali menyebabkan yang bersangkutan hamil dan melahirkan. Mereka mengalami penderitaan luar biasa, baik lahir maupun batin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia 1926-1948/1965*. (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 1988)
- Antara*, Dinas Dalam Negeri. No. 160/A. 9 Juni 1950. (Garba Budaya, 1999).
- Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI, Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di*

- Indonesia* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), hlm. 91-93.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. (Jakarta: Jambatan, 1971)
- Wierenga, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: 1999)
- Koran  
*Harian Rakjat*, 1 Desember 1952  
*Harian Rakjat*, 1 oktober 1958  
*Harian Rakjat*, 1 September 1954  
*Harian Rakjat*, 14 November 1958  
*Harian Rakjat*, 2 April 1954  
*Harian Rakjat*, 22 Juni 1956  
*Harian Rakjat*, 27 Maret 1954  
*Harian Rakjat*, 18 Desember 1957  
*Harian Rakjat*, 8 Januari 1958  
*Harian Rakjat*, 9 Juni 1954